

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (PIP) DI KELURAHAN TUAN KENTANG TAHUN 2020

Dewi Astuti (1), Doris Febriyanti (2), M. Qur'anul Kariem (3)

(1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

(2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

(3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

Email Korespondensi: dewiastariastianti@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui evaluasi kebijakan PIP dan mendeksripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat Kebijakan KIP di Tuan Kentang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif mulai dari pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data bersifat deskriptif dengan tahap mereduksi data, paparan data, dan kesimpulan. Hasil penyelenggara PIP di kelurahan Tuan Kentang sangat layak di dukung dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan PIP di SMP 31 dan SMP meningkatnya apresiasi dan dukungan dari penerima manfaat PIP dan menguatnya jaringan kerjasama dalam menyelenggarakan PIP antar komponen yang terlibat. Pihak penyelenggara PIP sudah menjalankan program dengan baik sesuai petunjuk teknis. Pihak sekolah juga bekerja cepat dalam memfasilitasi penerima manfaat ketika harus berurusan dengan pihak bank sebagai penyalur dana. Komunikasi yang terkait waktu pencairan juga terjalin dengan baik. Terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima manfaat PIP di Tuan Kentang. Selain itu pihak Tuan Kentang juga masih sangat kesulitan untuk memonitoring penggunaan dana bantuan oleh penerima dana sehingga tidak diketahui apakah penggunaan sesuai kebutuhannya. PIP di Tuan Kentang belum mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin di Tuan Kentang. Hal ini dikarenakan PIP belum mampu membantu memenuhi kebutuhan sekolah secara penuh yang dirasakan penerima manfaat bantuan baru dalam tahap meringankan biaya pendidikan.

Kata kunci; Evaluasi, Kebijakan, PIP

Abstract: *The purpose of this study is to determine the evaluation of PIP policies and to define the supporting and inhibiting factors of KIP Policy in Mr. Potato. In this study, qualitative methods were used from data collection used were observation, interviews and documentation, the data analysis method was descriptive with the stage of reducing data, data exposure, and conclusions. The results of the PIP organizers in Tuan Kentang village are very worthy of being supported by the improvement of the quality of PIP implementation in SMP 31 and SMP increasing appreciation and support from PIP beneficiaries and strengthening the network of cooperation in organizing PIP between the components involved. The PIP organizers have run the program well according to technical instructions. The school also works quickly in facilitating beneficiaries when it comes to dealing with banks as fund dealers. Communication related to the timing of disbursement is also well established. There was a target inaccuracy in the determination of pip beneficiaries in Mr. Potato. In addition, Mr. Potato is also still very difficult to monitor the use of aid funds by the recipient of the funds so it is not known whether the use is as needed. PIP in Mr. Potato has not been able to improve the access to education of the poor in Mr. Potato. This is because PIP has not been able to help meet the full needs of schools felt by the beneficiaries of the new assistance in the stage of reducing the cost of education.*

Keywords: Evaluation, Policy, PIP

Article History:

Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 08-08-2023



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam membangun dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), karena pendidikan dianggap mampu menciptakan manusia yang produktif dalam memajukan suatu bangsa (Yusup et al., 2019). Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung sehingga memberikan dampak bagi anak-anak (Rifai & Mahpudz, 2019).

Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang berkaitan sangat erat bila dikaitkan dengan kesejahteraan yang ada dimasyarakat. Untuk meminimalisir hambatan ini agar program pemerintah dapat tercapai (Hayati & Sari, 2019). Hak untuk memperoleh layanan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” dan pada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar ialah merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya pernah ada yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program ini bertujuan guna meningkatkan akses pendidikan anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan dan ikut serta mencegah anak putus sekolah. Kebijakan dari program kartu Indonesia pintar merupakan melakukan upaya perbaikan dalam bidang pendidikan. hal tersebut dilakukan agar permasalahan jumlah siswa putus sekolah di Indonesia dapat segera teratasi (Haqiqi & Prabawati, 2019).

Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Rohaeni & Saryono, 2018).

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar salah satunya yaitu adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana PIP ini. Padahal sejatinya pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan (Edrial et al., 2022). Padahal yang seharusnya pemerintah meluncurkan program ini yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu supaya mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang sama. Program unggulan Presiden Joko Widodo Kartu ini diresmikan bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera pada 3 November 2014. Kartu Indonesia Pintar di peruntukkan bagi anak usia sekolah (6-21 tahun) untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal.

Semula kebijakan ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran, namun hal ini dibantah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut. Pada tahun 2015 penerima manfaat KIP meningkat dari target 15 juta siswa menjadi 19 juta siswa, dengan penyaluran dana yang telah mencapai 100% pada akhir tahun 2019. Melalui web resmi yaitu SIPINTAR (sistem informasi program indonesia pintar) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan hasil distribusi dari KIP dari hingga 8 Desember 2020, dana PIP sudah disalurkan kepada 12.908.246 siswa dengan rincian yaitu 7.625.596 orang untuk SD, 3.598.925 orang untuk SMP, 710.037 orang untuk SMA dan 973.688 orang untuk SMK”. [Tribunnews.com](http://tribunnews.com).

Bantuan dana pendidikan secara tunai melalui PIP dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa seperti pembelian seragam dan perlengkapan sekolah, buku dan alat tulis, transportasi



kesekolah, uang saku, kursus tambahan dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan manfaat pendidikan di sekolah (Agusman, 2019). Permasalahan lain yang terjadi dalam Program Kartu Indonesia Pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan hal ini terlihat dari masih rendahnya pengetahuan wali murid tentang peruntukkan bantuan KIP, dalam pemberian bantuan ini kurang tepat sasaran, terdapat penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana Program Kartu Indonesia Pintar oleh penerima bantuan. Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung di terima di bank, yang mengelolah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.

Kelurahan Tuan Kentang merupakan salah satu kelurahan yang ada Di Kecamatan Jakabaring yang menerima bantuan dana KIP. Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring (2020) terdapat 46 siswa yang menerima bantuan kartu indonesia pintar (PIP) yang terdiri dari 3 SD, 2 SMP, 1 SMA, masing-masing menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000.00 pertahun untuk SMA, Rp.750.000.00 pertahun, untuk SMP dan Rp. 450.000,00 untuk SD dana tersebut di berikan pertahun (untuk perdua semester). Tanggapan masyarakat yang telah positif mendapatkan bantuan dana PIP memungkinkan juga masyarakat akan bersikap mendukung KIP dengan memanfaatkan dana KIP dengan bijak hal ini dibuktikan mayoritas masyarakat menolak jika dana KIP digunakan untuk membeli pakaian. Oleh karena masyarakat yang sudah memiliki tanggapan yang baik terhadap pemanfaatan KIP, diharapkan terus konsisten dan tidak terpengaruh meski dihadapkan pada keadaan ekonomi yang sulit.

Siswa tersebut mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera yang di kirim dri pemerintahan pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini (PIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengetahui respon dan tanggapan masyarakat secara operasional. Oleh karna itu, penelitian ini perlu di lakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai evaluasi Kebijakan Terhadap Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (PIP) di Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabring. Pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar yang belum maksimal digunakan oleh penerima. Di karenakan Kurangnya sosialisasi pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar oleh sekolah. Pengetahuan tentang Program Indonesia Pintar kurang dipahami oleh calon penerima Program Indonesia Pintar dan Pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar oleh Orang tua/wali murid penerima manfaat belum diketahui. Oleh karna itu perlunya dilakukan evaluasi dalam pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar di kelurahan tuan kentang.

Kelurahan Tuan Kentang kecamatan jakabaring adalah salah satu sekolah yang ada di kelurahan tersebut yang telah menjalankan Program Indonesia Pintar selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pegawai/staf SMP 31 dan SMA Pelita menyebutkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum optimal, dikarenakan kendala teknis yang masih bisa terjadi pada saat program dilaksanakan, seperti 1) Pencairan yang terlalu lambat sehingga ada peserta didik yang sudah berhenti, pindah atau lulus dari sekolah. 2) Kurangnya pemahaman dari orang tua terkait Program Indonesia Pintar. 3) Proses pencairan dana Program Indonesia Pintar yang mengharuskan siswa dan orang tua untuk pergi langsung ke lembaga penyalur (Bank), dan banyak siswa yang izin untuk melakukan proses pencairan tersebut, sehingga dapat mengganggu proses belajar.

Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk mencari tahu sejauh mana pelaksanaan Program Indonesia Pintar kepada para penerima manfaat di kelurahan Tuan Kentang. Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji menganalisis dari kebenaran suatu pengetahuan. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui evaluasi kebijakan kartu indonesia pintar di Kelurahan Tuan Kentang 2) Untuk mendeksripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Tuan Kentang 3) Mengetahui pemanfaatan dana program indonesia pintar di kelurahan tuan kentang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini adalah untuk menjelaskan secara setruktur mengenai Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Tuan Kentang



Palembang dengan melihat data-data yang peneliti peroleh di lapangan. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 31 Palembang dan SMP pelita alembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Konteks

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa SMP Pelita Kelurahan Tuan Kentang, dapat disimpulkan bahwa orang tua memahami tentang kartu Indonesia pintar selain itu orang tua sangat terbantu dengan adanya program KIP. Mereka yang sebelumnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya karena masalah biaya, sekarang menjadi lebih terbantu karena adanya bantuan KIP, sehingga biaya serta kebutuhan sekolah dapat terpenuhi, dan juga bisa membantu orang tua menghemat uang mereka karena uang penghasilan orang tua yang biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah, sekarang diganti dengan uang yang didapat dari program KIP, walaupun jumlah uang bantuan yang diterima tidak terlalu besar.

Adanya Kartu Indonesia Pintar (PIP) membantu peserta didik menekan biaya sekolah. KIP dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan akses layanan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu sampai mereka lulus dari sekolah menengah. Dengan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar), peserta didik dapat membeli buku, membeli tas, seragam dan sepatu menjadi lebih mudah. Kami berharap dengan menerima KIP ini, anak-anak kita dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, berprestasi dan dapat mengabdikan kepada semua orang. Kami berharap program KIP akan terus berkembang baik jumlahnya maupun siswa yang menerimanya.

Evaluasi Input

Evaluasi input dalam model CIPP bertujuan memilih sumberdaya, menentukan alternatif strategi yang di gunakan dan pengambilan keputusan dalam mencapai target yang di harapkan. Komponen input meliputi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana /anggaran, berbagai prosedur dan aturan yang di perlukan.

A. Rencana Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada Siswa Sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (PIP). Melalui Kartu Indonesia Pintar ini, nantinya para Siswa akan diberikan bantuan dana tunai dari pemerintah secara regular yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk meringankan beban biaya sekolah. Pelaksanaan program kartu Indonesia pintar dari kelurahan untuk sekolah terdiri dari tiga indikator, yaitu data siswa pemegang KIP, Surat Keputusan (SK) struktur penanggung jawab KIP. Data sekolah sangat perlu digunakan untuk melihat kesiapan pihak sekolah dalam mencari calon penerima bantuan sesuai dengan persyaratannya. Data sekolah terdiri dari data siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar yang telah dimiliki baik sewaktu masih di SD maupun yang telah dicetak sewaktu masuk SMP. Indikator struktur penanggung jawab KIP digunakan untuk mengetahui kesiapan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) dan juga sebagai legalitas hukum bagi pengelola yang ditunjuk oleh sekolah.

B. Sumber Daya Manusia

Dilapangan sendiri pelaksana Program Indonesia Pintar dapat memahami dengan benar maksud dan tujuan Program Indonesia Pintar. Keberhasilan dapat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sekolah penerima Program Indonesia Pintar. Faktor pendukungnya yaitu sumber daya manusia yang berkompeten sebagai pelaksana Program Indonesia Pintar dapat memahami kebijakan dengan baik dan komunikasi yang berjalan dengan lancar antara Dinas Pendidikan. PIP Kemdikbud diperuntukkan bagi siswa berusia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin. Program ini diprioritaskan bagi siswa pemegang KIP yang diperoleh dari hasil pemadanan terkini data yang terdapat di Dapodik dengan DTKS Kemensos, jadi bagi siswa yang terdaftar disekolah dan mempunyai KIP maka siswa berhak untuk didaftarkan oleh sekolah untuk mendapatkan bantuan dari program PIP, selain itu bagi yang tidak dapat bantuan maka siswa dapat mendaftar dengan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/Rw dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.

C. Anggaran Dana

Dana bantuan Program Indonesia Pintar diambil dari Keuangan Negara. Namun jumlah anggaran dana yang ada belum mencukupi kuota siswa miskin yang ada di kelurahan tuan ketang. Sehingga yang terjadi banyak siswa miskin di SMP PELITA dan SMP Negeri 31 Palembang tidak mendapatkan dana bantuan Program Indonesia Pintar. Pengelola Program Indonesia Pintar yang ada di kelurahan Tuan Kentang mensiasati keterbatasan dana anggaran tidak adanya anggaran untuk memberikan sosialisasi ke pada masyarakat anggaran dana hanya diberikan oleh siswa yang mendapat bantuan KIP saja.

D. Fasilitas dan Prasarana

Keefektifan suatu program juga tergantung pada fasilitas dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat fasilitas dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar tersebut. Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) di Kelurahan Tuan Kentang belum sepenuhnya terpenuhi, contohnya seperti kendaraan, komputer dan bank penyalur yang kurang berpartisipasi dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar. Lambatnya bank penyalur menyebabkan penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar lambat dalam pencairan. Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang wajib disediakan untuk proses pelaksanaan program. Fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi suatu program. Semakin baik sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan pusat akan mempengaruhi semakin baiknya kerja program seseorang dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

Evaluasi Proses

Pelaksanaan sosialisasi dalam proses evaluasi Program Indonesia Pintar dapat terlihat dari dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah termasuk SMP Negeri 31 Palembang dan SMP PELITA yang ada di Kelurahan Tuan Kentang, yang kemudian pihak sekolah menyampaikan informasi kepada orang tua penerima Program Indonesia Pintar. Ketidak berhasilan sosialisasi Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 31 Palembang kelurahan Tuan Kentang terlihat dari kelanjutan sosialisasi sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terjadi permasalahan karena kelanjutan sosialisasi hanya disampaikan melalui aplikasi/web resmi Program Indonesia Pintar, surat pemberitahuan, media sosial dan penyebaran informasi dilakukan berjenjang.

Kesimpulan dari wawancara tersebut ialah faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi dikarenakan masih kurangnya perhatian pelaksana sosialisasi, yang mana pelaksana kurang tanggap menjalankan perannya dalam kegiatan sosialisasi. Informasi tidak serempak dan merata, dikarenakan penyebaran informasi tidak dilakukan secara bersamaan dan oleh sebab itu penerimaan informasi menjadi tidak serempak dan merata, dan Koordinasi pelaksana kurang, dimana hanya pada awal bergulirnya program ini saja diadakan pertemuan resmi untuk membahas Program Indonesia Pintar antara pelaksana yang bertanggungjawab Dinas Pendidikan dengan pelaksana. Dan untuk kelanjutannya dilakukan melalui media-media perantara tidak secara langsung.

Evaluasi Produk/Outcomes

Tujuan Program Indonesia Pintar sudah tercapai namun belum dapat dikatakan berhasil. Program Indonesia Pintar di Kelurahan Tuan Kentang belum mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin di Pota Palembang. Hal ini dikarenakan Program Indonesia Pintar belum mampu membantu memenuhi kebutuhan sekolah secara keseluruhan. Yang dirasakan penerima manfaat bantuan baru dalam tahap meringankan biaya pendidikan

Keberhasilan mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar dilapangan dapat dilihat faktor penyebabnya yaitu dari adanya alur penetapan penerima yang baik, juga terdapat verifikasi data yang dilakukan



Dinas Pendidikan dan kelurahan untuk dilihat kembali mana yang benar-benar layak baru dikirim lagi ke Kemendikbud untuk validasi data. Ketidak berhasilan mekanisme penetapan Program Indonesia Pintar terlihat dilapangan disebabkan faktor kurangnya sumber daya anggaran yang menyebabkan tidak dapat terselenggaranya pertemuan antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah untuk mempublikasikan hasil penerima Program Indonesia Pintar. Publikasi penerima Program Indonesia Pintar hanya di informasikan melalui aplikasi/web resmi, edaran pemberitahuan atau media sosial whatsapp.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

A. Komunikasi

Kelancaran dalam Program Indonesia Pintar Intensitas pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Sekolah jarang dilakukan secara langsung karena pemberitahuan informasi lebih sering menggunakan media penghubung melalui media sosial. Sementara pertemuan sekolah dengan orang tua penerima program dilakukan pada saat rapat pembagian rapot sekolah guna membahas lebih lanjut terkait Program Indonesia Pintar. Media yang digunakan dalam proses komunikasi melalui email, aplikasi, whatsapp. Kejelasan Informasi dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kejelasan informasi yang disampaikan oleh implementor dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar dalam penelitian ini sudah berjalan dengan baik diketahui bahwa pihak Dinas Pendidikan dalam menyampaikan informasi sudah dijelaskan sedetail-detailnya.

Komunikasi atau informasi yang sekolah terima dari dinas selalu jelas dan tidak membingungkan. Tidak pernah terjadi kesalah pahaman dalam berkomunikasi dan memberikan informasi. Tidak pernah ada komplain dan diterima dengan baik. Transparansi dalam penyampaian informasi dari pihak sekolah ke wali murid penerima Program Indonesia Pintar menurut para wali murid sudah dikatakan transparan semua yang dilakukan sekolah dari mulai pemberitahuan penerima dana Program Indonesia Pintar, pencairannya sampai kebijakan bahwa dana yang didapat dari Program Indonesia Pintar di tabung di sekolah semua diberitahukan secara transparan sampai dengan pertanggungjawaban dananya.

B. Sumber Daya Manusia

Terkait Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Program Indonesia Pintar, dapat disimpulkan bahwa kuantitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap Program Indonesia Pintar belum cukup untuk melingkupi seluruh sekolah SMP dikelurahan Tuan Kentang. Sedangkan di SMP Negeri 31 Palembang dan SMP PELITA kuantitas sumber daya manusianya telah memadai karena dengan lingkup sekolah yang kecil ada 6 sumber daya manusia yang bertanggung jawab. Kriteria yang digunakan untuk menentukan SDM/Pegawai yang ikut serta dalam Program Indonesia Pintar belum ditentukan sesuai dengan keahliannya pegawai, karena dilapangan tidak diterapkan kriteria tertentu dan spesifik akan tetapi yang utama harus menguasai Informasi dan Teknologi (IT). Dapat disimpulkan bahwa SDM disini belum di pilih sesuai dengan kriteria yang kapabilitas. Di SMP Negeri 31 Palembang kelurahan Tuan Kentang para sumber daya manusia yang terkait dalam Program Indonesia Pintar belum bekerja dengan maksimal karena mereka merasa terpaksa ikut turut serta dalam Program Indonesia Pintar.

Faktor Penghambat Program Indonesia Pintar

Peneliti juga telah mendapatkan beberapa poin yang menjadi penghambat dalam proses pemanfaatan Program Indonesia Pintar. Berikut faktor penghambat pelaksanaan PIP di kelurahan Tuan Kentang:

- 1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sekolah dan dinas terkait sehingga banyak orang tua siswa penerima KIP tidak memahami mengenai Program Indonesia Pintar.
- 2) Informasi yang selalu mudur dari Dinas terkait sehingga tidak ada kepastian dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- 3) Waktu pencairan dan KIP yang tidak sesuai dengan waktu kebutuhan siswa.
- 4) Tidak ada monitoring dari Dinas terkait dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- 5) Siswa tidak melapor saat dana PIP sudah diambil di bank.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) di kelurahan Tuan Kentang belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui indikator evaluasi kebijakan menurut stufflebeam, H McKee and B McKee yang terdiri dari evaluasi konteks, input, proses, dan outcome. Pelaksanaan Program kartu Indonesia Pintar (PIP) di kelurahan Tuan Kentang masih terdapat kendala yaitu proses sosialisasi, pencairan yang tidak tepat waktu, pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan, dana bantuan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa yang kurang mampu, masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran dan masih belum tepat sasaran dan komunikasi dari pihak pelaksana, aktivitas pelaksana kurang maksimal di sebabkan kurangnya perhatian dari pelaksana tingkat atas sehingga informasi penyaluran dana tidak tepat waktu.

Dalam evaluasi konteks penyelenggara Program Indonesia Pintar di kelurahan Tuan Kentang sangat layak di jalankan program ini. Hal ini di dukung dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan Program Indonesia Pintar di SMP 31 dan SMP Pelita yang ada di kelurahan Tuan Kentang meningkat nya apresiasi dan dukungan dari penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan menguatnya jaringan kerjasama dalam menyelenggarakan Program Indonesia Pintar antar komponen yang terlibat, namun perlu ada perbaikan sistem dalam implementasinya.

Pada evaluasi input pihak penyelenggara Program Indonesia Pintar sudah menjalankan program dengan baik sesuai petunjuk teknis. Pihak sekolah juga bekerja cepat dalam memfasilitasi penerima manfaat ketika harus berurusan dengan pihak bank sebagai penyalur dana. Komunikasi dan informasi yang terkait waktu pencairan juga terjalin dengan baik. Namun ditemukan bahwa pihak sekolah kesulitan dalam mengontrol penggunaan dana manfaat Program Indonesia Pintar sehingga rawan terjadi ketidaktepatan penggunaan dana yang berpengaruh kepada akses pendidikan siswa miskin tersebut. Selain itu sistem pelayanan yang menyangkut aduan-aduan masalah Program Indonesia Pintar masih menggunakan sistem konvensional dalam hal ini adalah para penerima bantuan program yang mengalami masalah biasanya langsung datang kesekolah dan menanyakan langsung kepada pihak sekolah. Padahal bila kita lihat pihak pusat maupun pihak Kemendikbud pusat yang menjalankan program Indonesia Pintar secara nasional menyediakan sebuah sistem pengaduan masalah Program ini secara online baik melalui website, SMS, call center dan sebagainya.

Pada evaluasi proses terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima manfaat Program Indonesia Pintar di kelurahan Tuan Kentang. Selain itu masalah komunikasi juga menjadi persoalan lanjutan dalam hal pemanfaatan dana bantuan PIP oleh penerima di Kota Palembang. Dana tersebut berupa uang tunai, dan diterima langsung oleh siswa (didampingi orang tua/wali), sehingga tidak ada yang bisa mengontrol penggunaannya. Memang dari pihak sekolah juga tidak ada sosialisasi resmi tentang penggunaan dana. Dinas Pendidikan dan sekolah sulit untuk memonitor penggunaan dana bantuan PIP, dan selama ini yang bisa dilakukan hanyalah mengingatkan kepada para siswa agar uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan.

Pada evaluasi keberhasilan mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar dilapangan dapat dilihat faktor penyebabnya yaitu dari adanya alur penetapan penerima yang baik, juga terdapat verifikasi data yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kelurahan untuk dilihat kembali mana yang benar-benar layak baru dikirim lagi ke Kemendikbud untuk validasi data. Ketidak berhasilan mekanisme penetapan Program Indonesia Pintar terlihat dilapangan disebabkan faktor kurangnya sumber daya anggaran yang menyebabkan tidak dapat terselenggaranya pertemuan antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah untuk mempublikasikan hasil penerima Program Indonesia Pintar.

REFERENSI

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113.
- Edrial, A, R. P., & Sujastiawan, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Di Sma Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. *JKSAP : Jurnal Kapita Selektu Administrasi Publik*, 3(1), 109–116.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Haqiqi, N. M. Y. A., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarbandlong Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 7(8), 1–8.
- Hayati, N., & Sari, E. Y. (2019). Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 468–480.
- Rifai, A., & Mahpudz, A. (2019). Dampak Faktor Ekonomi Orang Tua Terhadap Keberlanjutan Pendidikan Anak Usia 14-20 Tahun Di Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. *Edu Civic*, 37–45.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Manajemen bimbingan koseling kerier di sekolah menengah pertama kristen di salatiga. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1).

